

## **BAB VI**

### **SARAN**

Berdasarkan Praktek Kerja Profesi (PKP) yang telah dilakukan di Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo yang berlangsung selama empat minggu, mulai dari tanggal 18 Juli sampai 13 Agustus 2010 dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

#### **Bagi mahasiswa:**

1. Sebelum melaksanakan PKP di apotek, calon Apoteker sebaiknya membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian, manajemen apotek serta teknik berkomunikasi agar pada saat PKP dapat memberikan pelayanan KIE kepada pasien.
2. Mahasiswa sebagai calon Apoteker hendaknya meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan menambah wawasan serta pengetahuan yang cukup tentang obat-obatan yang sering digunakan oleh masyarakat agar dapat memberikan pelayanan KIE kepada pasien dengan benar dan jelas.

#### **Bagi Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo:**

1. Pengisian kartu *stock* maupun *monitoring* tanggal kadaluarsa yang telah berjalan secara manual supaya lebih ditingkatkan dengan menggunakan sistem komputerisasi, sehingga memudahkan dalam *monitoring* persediaan barang.
2. Program komputer khusus yang tersedia secara *online* di semua loket-loket apotek, perlu ditingkatkan dan apabila memungkinkan selalu mengikuti perkembangan sistem informasi teknologi sehingga dapat meningkatkan pelayanan dari apotek.

3. Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo perlu melakukan pelatihan maupun pendidikan bagi karyawan apotek, seperti Tenaga Teknis Kefarmasian, Juru Resep tentang bagaimana menata, meracik, menyimpan maupun menjaga stabilitas obat dengan baik.
4. Untuk lebih meningkatkan kepuasan konsumen, perlu adanya peningkatan mutu pelayanan meliputi kecepatan, keramahan, ketepatan dan pemberian KIE yang lebih aktif.
5. Apotek hendaknya mengevaluasi mutu pelayanan secara berkala, misalnya dengan mengadakan survey berupa angket agar mutu pelayanan di apotek dapat diperbaiki dan ditingkatkan lagi.
6. Sebaiknya diadakan pelayanan PMR (*Patient Medication Record*), yaitu pembuatan dokumentasi terhadap pengobatan pasien, agar pasien dapat lebih mengenal peranan farmasis dalam memberikan informasi dan pelayanan obat.

**Bagi kampus:**

1. Sebelum melaksanakan PKP di apotek, sebaiknya kampus memberikan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian, manajemen apotek serta teknik berkomunikasi, agar pada saat PKP calon Apoteker dapat memberikan pelayanan KIE kepada pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dailymed, [2010], Roche Products Inc (<http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?id=18533>, diakses 31 Juli 2011).
- Departemen Farmakologi dan Terapeutik, 2007. *Farmakologi dan Terapi*, Edisi 5, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hartini dan Sulasmono, 2007. *APOTEK: Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundangan Terkait Apotek Edisi Revisi*, cetakan kedua. Penerbit Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- IAI Jawa Timur, 2010. *Kumpulan Peraturan Perundangan Kefarmasian*. Surabaya.
- ISFI, 2008. *ISO Farmakoterapi*, PT ISFI, Surabaya.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek, 1990, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Mastiah, [2009]. *Peluang Bisnis Apotek* (online), (<http://apotikfarmasi.blogspot.com/2009/07/peluang-bisnis-apotek.html>, diakses 15 Juli 2011).
- MIMS Indonesia: *Petunjuk Konsultasi*, Edisi 9, 2009. CMP Medica. PT. Info Master, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan No.919/MenKes/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat yang dapat diserahkan tanpa Resep, 1993, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965 tentang apotik, 1980, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Seto, Soerjono., Nita, Yunita., Triana, Lily, 2008, *Manajemen Farmasi*, Airlangga University Press, Surabaya.

Sweetman, S. C., 2009. *Martindale 36<sup>th</sup>*: The Extra Pharmacopoeia, The Pharmaceutical Press. London.

Umar, M., Drs., Apt., MM., 2005. *Manajemen Apotek Praktis*. Cetakan 1. CV. Ar-Rohman, Solo.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.